



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
JL. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By-Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Fax. (021) 26273535, website : badilum.mahkamahagung.go.id PO. BOX. 1148 JKT 13011 JAT

Nomor : 1723/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas

Jakarta, 06 November 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Perintah

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

di tempat

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 15618/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025, serta dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Tidak Tertib, dengan ini Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum :

- a. Menginstruksikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Terlampir lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pemotongan dan pemungutan pajak (Lampiran I); dan
- b. Menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Terlampir:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai ketentuan (Lampiran I);
 - 2) Menagih kekurangan penerimaan negara sebesar Rp354.982.231,00 (Rp314.772.328,00 + Rp24.106.207,00 + Rp16.103.696,00) dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak (Lampiran II); dan
 - 3) Menyampaikan Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor pajak mandiri berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak sebesar Rp145.650.297,00 (Lampiran III).

Demikian, kami sampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Pengadilan Tinggi Ambon
2.	Pengadilan Tinggi Banten
3.	Pengadilan Tinggi Palembang
4.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
5.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
6.	Pengadilan Tinggi Gorontalo
7.	Pengadilan Tinggi Kendari
8.	Pengadilan Tinggi Riau
9.	Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
10.	Pengadilan Negeri Kediri
11.	Pengadilan Negeri Kraksaan
12.	Pengadilan Negeri Muara Enim
13.	Pengadilan Negeri Sanggau
14.	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
15.	Pengadilan Negeri Sungai Liat
16.	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan
17.	Pengadilan Negeri Tuban
18.	Pengadilan Negeri Watansopeng
19.	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
20.	Pengadilan Negeri Calang
21.	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
22.	Pengadilan Negeri Kraksaan
23.	Pengadilan Negeri Sleman
24.	Pengadilan Negeri Bangkalan
25.	Pengadilan Negeri Boyolali
26.	Pengadilan Negeri Batang
27.	Pengadilan Negeri Bitung
28.	Pengadilan Negeri Gorontalo
29.	Pengadilan Negeri Wonosobo
30.	Pengadilan Negeri Una Aha
31.	Pengadilan Negeri Tobelo
32.	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

33.	Pengadilan Negeri Watampone
34.	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
35.	Pengadilan Negeri Pelalawan
36.	Pengadilan Negeri Bobong
37.	Pengadilan Negeri Banjarmasin
38.	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
39.	Pengadilan Negeri Cibinong
40.	Pengadilan Negeri Pleihari
41.	Pengadilan Negeri Tebo
42.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
43.	Pengadilan Negeri Kendari
44.	Pengadilan Negeri Banjar
45.	Pengadilan Negeri Belopa
46.	Pengadilan Negeri Fak Fak



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15618/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Tidak Tertib, dengan ini memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja terkait untuk:

- a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemotongan dan pemungutan pajak (Lampiran I);
- b. Menginstruksikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing Satuan Kerja terkait lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pemotongan dan pemungutan pajak (Lampiran I); dan
- c. Menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai ketentuan (Lampiran I);
 - 2) Menagih kekurangan penerimaan negara sebesar Rp354.982.231,00 (Rp314.772.328,00 + Rp24.106.207,00 + Rp16.103.696,00) dan menyetorkannya ke Kas Negara, serta menyampaikan Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak (Lampiran II); dan
 - 3) Menyampaikan Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor pajak mandiri berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Penerimaan Pajak sebesar Rp145.650.297,00 (Lampiran III).

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
9. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
10. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
11. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
12. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;
13. Yth. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
14. Yth. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
15. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; dan
16. Yth. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

B.8.a.b&c1)2)3)



LAMPIRAN I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Nomor : 15618/SEK/PW1.4/X/2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Kepaniteraan
2.	Badan Urusan Administrasi
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
5.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
6.	Pengadilan Tinggi Ambon
7.	Pengadilan Tinggi Banten
8.	Pengadilan Tinggi Palembang
9.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
10.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
11.	Pengadilan Tinggi Gorontalo
12.	Pengadilan Tinggi Kendari
13.	Pengadilan Tinggi Riau
14.	Pengadilan Tinggi Kendari
15.	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
16.	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
17.	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
18.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
19.	Mahkamah Syari'ah Banda Aceh
20.	Mahkamah Syari'ah Meulaboh
21.	Mahkamah Syari'ah Sigli
22.	Pengadilan Agama Bontang
23.	Pengadilan Agama Gresik
24.	Pengadilan Agama Kuningan
25.	Pengadilan Agama Kupang
26.	Pengadilan Agama Sengkang
27.	Pengadilan Agama Ujung Pandang

No.	Nama Satuan Kerja
28.	Pengadilan Agama Calang
29.	Pengadilan Agama Martapura
30.	Pengadilan Agama Pringsewu
31.	Pengadilan Agama Sumber
32.	Pengadilan Agama Wonogiri
33.	Pengadilan Agama Kotamubagu
34.	Pengadilan Agama Ambarawa
35.	Pengadilan Agama Enrekang
36.	Pengadilan Agama Jepara
37.	Pengadilan Agama Kaimana
38.	Pengadilan Agama Lolak
39.	Pengadilan Agama Mentok
40.	Pengadilan Agama Muara Bulian
41.	Pengadilan Agama Muara Enim
42.	Pengadilan Agama Sangatta
43.	Pengadilan Agama Tigaraksa
44.	Pengadilan Agama Jayapura
45.	Pengadilan Agama Toli Toli
46.	Pengadilan Agama palopo
47.	Pengadilan Agama Sei Rampah
48.	Pengadilan Agama Soa Sio
49.	Pengadilan Agama Sarolangun
50.	Pengadilan Agama Kediri
51.	Pengadilan Agama Ampang
52.	Pengadilan Agama Pagar Alam
53.	Pengadilan Agama Rumbia
54.	Pengadilan Negeri Kediri
55.	Pengadilan Negeri Kraksaan
56.	Pengadilan Negeri Muara Enim
57.	Pengadilan Negeri Sanggau
58.	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
59.	Pengadilan Negeri Sungai Liat
60.	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan

No.	Nama Satuan Kerja
61.	Pengadilan Negeri Tuban
62.	Pengadilan Negeri Watansopeng
63.	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
64.	Pengadilan Negeri Calang
65.	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
66.	Pengadilan Negeri Kraksaan
67.	Pengadilan Negeri Sleman
68.	Pengadilan Negeri Bangkalan
69.	Pengadilan Negeri Boyolali
70.	Pengadilan Negeri Batang
71.	Pengadilan Negeri Bitung
72.	Pengadilan Negeri Gorontalo
73.	Pengadilan Negeri Wonosobo
74.	Pengadilan Negeri Una Aha
75.	Pengadilan Negeri Tobelo
76.	Pengadilan Militer Utama
77.	Pengadilan Militer III-18 Ambon
78.	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
79.	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
80.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
81.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

B.8.a.b&c1)

